

ANALISIS HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

SHAFI KINAR QAMARA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang adanya dinamika dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Munculnya dominasi kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam penanganan COVID-19 mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat menggunakan kewenangannya di daerahnya sendiri. Penanganan COVID-19 menjadi terlambat dan mengalami hambatan dari sisi kebijakan akan berdampak pada keamanan masyarakat yang apabila penanganannya tidak tepat sasaran akan berdampak fatal untuk stabilitas negara.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang datanya bersumber dari data pustaka yang dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan terdiri dari tiga tahapan analisis menurut Miles dan Huberman yakni, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dinamika hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *overlapping* dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang telah menjadi ancaman keamanan sehingga penanganan COVID-19 secara absolut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu, adanya perbedaan perspektif dalam tahap formulasi sampai implementasi kebijakan. Pemerintah Pusat cenderung membuat kebijakan untuk menunjang sektor perekonomian sedangkan kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berorientasi pada kesehatan masyarakat. Buruknya birokrasi, tidak sinkronnya peraturan, dan kurangnya kolaborasi menyebabkan terbentuknya sikap ego sektoral pada lembaga pemerintahan yang mengakibatkan lambatnya penanganan COVID-19 sehingga keamanan masyarakat terancam.

Kata kunci: COVID-19, Kebijakan, Keamanan Manusia, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat

**AN ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN THE CENTRAL
GOVERNMENT AND THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA
IN COVID-19 PANDEMIC HANDLING POLICY**

SHAFKA KINAR QAMARA

ABSTRACT

This study discusses about the dynamics in policies for handling COVID-19 pandemic between the Central Government and the Provincial Government of DKI Jakarta. The emergence of authority domination by the Central Government in handling COVID-19 has resulted in the Provincial Government of DKI Jakarta being unable to exercise their authority in their own region. The handling of COVID-19 has been delayed and experienced obstacle by policy issues that will be impacting public safety, if not handled properly this could have fatal consequences for national stability

This study uses the literature review method with a descriptive qualitative approach, sourcing data from literature collected through reading, note-taking, and processing research material. The data analysis technique employed in this study is content analysis which consist of three stages of analysis according to Miles and Huberman namely, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of this research found that the dynamics of the relationship between the Central Government and the Provincial Government of DKI Jakarta is due to the DKI Jakarta Provincial Government overlapping in policies for handling the COVID-19 pandemic which has become a security threat so that handling COVID-19 is absolutely within the authority of the Central Government. Apart from that, there are differences in perspectives from the formulation to policy implementation stages. The Central Government tends to make policies to support the economic sector, while the policies made by the DKI Jakarta Provincial Government are oriented towards public health. Poor bureaucracy, unsynchronized regulations, and lack of collaboration have led to the formation of ego sectoral attitudes in government institutions which have resulted in slow handling of COVID-19 so that public security is threatened.

Keyword: Central Government, COVID-19, Human Security, Local Government, Policy